

# Korban Penggusuran Mengadu ke Komnas HAM

REPUBLIKA,

10 JAN '18.



Komnas HAM Panggil Wali Kota Tangerang untuk menjelaskan sengketa lahan.

JAKARTA — Warga Kampung Mekar Sari, Kelurahan Penangungan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, beramai-ramai mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/1). Mereka mencari keadilan atas penggusuran 100 rumah oleh Pemerintah Kota Tangerang pada November lalu.

Ketua tim advokasi Ricky Umar yang juga ketua DPD Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten meminta Komnas HAM mendesak pihak-pihak terkait agar tidak melakukan pemagaran di area tersebut. Sebab, kepemilikan lahan yang diklaim sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) pengembang belum jelas.

"Kami minta masalah ini untuk tidak dilakukan tindakan represif apa pun juga, termasuk pemagaran, sanapai dengan statusnya jelas dan sedang ditangani Komnas HAM," kata Umar di Jakarta, Selasa (9/1).

Informasi yang ia dapat, pada Rabu (9/1) akan dilakukan pema-

garan yang melibatkan anggota organisasi masyarakat (ormas). Ia takut akan terjadi gesekan yang tidak diinginkan antara masyarakat dan ormas tersebut, terlebih mahasiswa juga direncanakan akan turun ikut menuntut keadilan.

Kepala Bagian Dukungan Mediasi Komnas HAM Johana Nunik Widiyanti mengatakan, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membantu mencari solusi. Menurut dia, Komnas HAM juga telah melayangkan surat kepada wali kota Tangerang untuk memintanya hadir di Komnas HAM pada 4 Januari.

Wali kota diminta memberikan kejelasan terkait masalah penggusuran. Namun, wali kota berhalangan hadir dan akan bertemu lagi pada 12 Januari 2018. Komnas HAM, kata dia, akan membantu dengan sekuat hati untuk menegakkan keadilan. "Tapi, ini ingatkan, ini sesuai dengan kewenangan kami," kata Nunik.

Salah satu warga RW 06, Erni (48 tahun), mengaku tinggal di daerah tersebut secara legal dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Bahkan, ia dan warga lain sudah ada yang tinggal sejak area tersebut masih kebun dan rawa-rawa pada tahun 1980-an.

Ia juga menayangkan atas sikap salah satu ormas yang pada awalnya ingin membantu warga kini malah berbalik ingin menyerang warga.

Erni hanya ingin menuntut keadilan sebagaimana mestinya.

"Saya punya cucu, saya sampai istighfar, bingung mau gimana lagi, ya. Saya cuma nuntut keadilan. Saya sampai tidur di kuburan, kena angin, kena hujan," katanya.

Pernyataan Erni dibenarkan oleh Asrul yang mengaku sebagai salah satu yang pertama kali menempati daerah tersebut. Ia berkebudan dan bertempat tinggal di situ sejak tahun 1980-an dan tak ada larangan. Status tanah baru muncul beberapa tahun terakhir ini.

"Saya punya kebun sekitar 1.000 meter, sekarang dibagi-bagi anak, dibangun rumah. KTP-KK asli, tidak bodong," katanya.

Ricky menambahkan, tanah tersebut dulunya merupakan tanah bekas perkebunan yang telantar, kemudian menjadi tanah negara. Namun, PT Bina Sarana Mekar (BSM) (sekarang PT Palembang Semi) menyetub tanah di area itu merupakan tanah adat atau tanah girik yang BSM memiliki pelepasan hak pada tahun 1983.

"Menurut dia (BSM) tanah adat, menurut kita tanah eks perkebunan yang ditelantarkan menjadi tanah negara yang dihuni masyarakat sekarang," katanya.

Berdasarkan data yang ia dapat, BSM menerima pelepasan hak itu pada tahun 1983, sementara BSM

baru masuk Tangerang pada tahun 1991. Umar sendiri telah meminta data riwayat tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), tetapi belum ada jawaban. Menurut dia, BPN telah mengeluarkan pernyataan bahwa tanah tersebut tidak ada kepemilikannya yang berarti tanah negara. "Jadi, menempatkan posisi hukum status hak yang sebenarnya atas tanah itu, kuncinya di BPN," katanya.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah membenarkan adanya panggilan Komnas HAM terkait penggusuran di Kampung Mekar Sari. Namun, Arief mengaku tidak mengetahui hal yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

Menurut Arief, Pemkot Tangerang sudah pernah menjelaskan duduk masalah tanah sengketa tersebut kepada Komnas HAM. "Kita juga sudah duluan ke sana, kita sudah sampaikan ke sana. Mereka (Komnas HAM) apresiasi, jadi kita sudah sampaikan semua," kata dia.

Arief berharap, Komnas HAM bisa menjadi mediator dalam kisruh sengketa tanah yang ada di Panunggan Barat antara Pemkot Tangerang, PT Palembang Semi, dan warga di Kampung Mekar Sari. "Jangan sampai masyarakat ini ditanggung sekelompok orang yang enggak jelas, karena dia kan enggak punya apa-apa sebenarnya," kata dia.

■ Singgih wiryono/mg01 ed: itam tirta